

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Pengertian Arah Kebijakan Umum

Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah secara umum. Penyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Bab V, selanjutnya ditetapkan Strategi, dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah. Sebelum menentukan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 - 2015, perlu memperhatikan amanat RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 - 2025.

7.2 Amanat RPJM Nasional Tahun 2010-2014

RPJM Nasional telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 - 2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN tahun 2010 - 2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Agar dapat memenuhi amanat ini, RPJMN tahun 2010 - 2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut:

1. **Buku I** memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN."
2. **Buku II** memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005 - 2025 dengan tema: "MEMPERKUAT SINERGI ANTAR BIDANG PEMBANGUNAN" dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

3. **Buku III** memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: “MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Dengan demikian, RPJMN tahun 2010 - 2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat / Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

7.3 Amanat RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 - 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2008. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan mempertimbangkan keinginan luhur dari para pendiri bangsa dan cerminan hati sanubari rakyat Sumatera Selatan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang, mengacu pada arahan RPJPD Sumatera Selatan tahun 2005 - 2025 (RPJPD), serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945, maka Visi Pembangunan Sumatera Selatan tahun 2008 - 2013 adalah:

“SUMATERA SELATAN SEJAHTERA DAN TERDEPAN BERSAMA MASYARAKAT CERDAS YANG BERBUDAYA”

Sejahtera adalah keadaan di mana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang, dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam kehidupannya.

Cerdas adalah sikap pikir profesional yang didasarkan pada landasan moral yang tinggi, kemampuan dan kecakapan dalam membaca situasi, menangkap dan mengolah peluang, serta merancang dan melaksanakan pemecahan masalah dalam semua situasi. Insan dan masyarakat yang cerdas akan selalu optimistis dan mampu memanfaatkan peluang untuk aktivitas yang produktif.

Terdepan adalah keadaan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan penguasaan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang tinggi, berkelanjutan, berada lebih baik dan menjadi acuan bagi daerah-daerah lain.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2008 - 2013 tersebut, misi pembangunan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan sumberdaya manusia (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal;
- (2) Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna;
- (3) Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fossil dan terbarukan) dengan cerdas, arif, dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas;

- (4) Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkuat kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar;
- (5) Membangun dan menumbuhkembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan;
- (6) Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat;
- (7) Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan;
- (8) Membangun pemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab, serta akuntabel;
- (9) Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakar pada nilai-nilai luhur "Simbur Cahaya";
- (10) Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama.

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia yang andal dengan produktivitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan, yaitu:
 - a. Daerah dengan masyarakat sehat, berpendidikan tinggi dan berwawasan informasi terdepan.
 - b. Daerah yang masyarakatnya memiliki kemampuan daya saing tinggi, kreatif dan produktif.
- (2) Mewujudkan daerah surplus pangan yang berkelanjutan dan komoditas perdagangan yang berdaya saing tinggi, yaitu:
 - a. Daerah penghasil pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan sesuai dengan kelayakan baku gizi yang baik.
 - b. Daerah pemasok pangan yang andal yang memperkuat ketahanan pangan nasional.
 - c. Daerah pengekspor komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi pendapatan daerah dan devisa.
- (3) Mewujudkan daerah lumbung energi nasional
 - a. Daerah pemasok sumber daya energi secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan batubara, minyak bumi, gas alam, energi panas bumi, gas metan dan energi terbarukan.
 - b. Daerah yang bijak dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam energi, air, hutan dan lain-lain bagi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Mengembangkan daerah industri maju berbasis sumberdaya lokal dengan optimasi peningkatan nilai tambah dan modal.
 - a. Daerah yang mempunyai kompetensi dalam memanfaatkan sumber daya manusia, alam dan buatan dengan memperhitungkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

- b. Kemitraan strategis yang mampu membangun dalam pengembangan industri pengolahan.
 - c. Daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat dari nilai tambah industri, serta kompetisi yang sehat, adil, dan terbuka.
- (5) Mengembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
- a. Daerah yang memiliki pusat-pusat penelitian dan lembaga pendidikan dalam pengembangan teknologi yang maju dan modern untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan
- (6) Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah.
- a. Daerah dengan jaringan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah.
 - b. Daerah dengan jaringan informasi dan komunikasi merata ke seluruh wilayah.
- (7) Mewujudkan jejaring kerjasama ekonomi dan kelembagaan.
- a. Daerah yang memiliki jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan.
- (8) Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel.
- a. Daerah yang mempunyai pelayanan publik, sistem informasi terpadu dan penjamin mutu yang berkualitas
 - b. Daerah dengan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien
 - c. Daerah dengan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.
- (9) Mewujudkan daerah yang mempunyai budaya daerah yang kuat yang berakar pada nilai-nilai luhur,
- a. Daerah yang mengembangkan dan melestarikan budaya daerah
- (10) Mewujudkan toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama
- a. Daerah yang bermasyarakat agamis dan berakhlak mulia
 - b. Daerah yang mempunyai kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama
 - c. Daerah maju yang berakar pada nilai-nilai keagamaan.

Untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- (1) Tujuan 1 : Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia andal dengan produktivitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan dengan sasaran :
- Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berwawasan informasi terdepan
 - Terwujudnya masyarakat yang kreatif dan memiliki kemampuan daya saing tinggi.
- (2) Tujuan 2 : Mewujudkan daerah surplus pangan yang berkelanjutan dan komoditas perdagangan yang berdaya saing tinggi, dengan sasaran:

- Terpenuhinya pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan sesuai dengan kelayakan baku gizi yang baik.
 - Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai pemasok pangan yang andal yang memperkuat ketahanan pangan nasional.
 - Meningkatnya ekspor komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi pendapatan daerah dan devisa
- (3) Tujuan 3 : Mewujudkan daerah lumbung energi nasional, dengan sasaran:
- Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai pemasok sumber daya energi secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan batubara, minyak bumi, gas alam, energi panas bumi, gas metan, dan energi terbarukan.
- (4) Tujuan 4 : Mewujudkan daerah industri maju berbasis sumberdaya lokal dengan optimasi peningkatan nilai tambah dan modal, dengan sasaran:
- Terwujudnya kompetensi, peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhitungkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan.
 - Berkembangnya kemitraan strategis dalam pengembangan industri pengolahan.
 - Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai daerah penerima terbesar dari sektor industri pengolahan manufaktur.
- (5) Tujuan 5 : Mewujudkan daerah yang dapat menopang kekuatan industri nasional yang berbasis kreativitas dan inovasi, dengan sasaran :
- Berkembangnya pusat-pusat penelitian dan lembaga pendidikan dalam pengembangan teknologi yang maju dan modern untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan
- (6) Tujuan 6 : Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan sasaran :
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
 - Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata keseluruh wilayah.
 - Terwujudnya jaringan informasi dan komunikasi yang merata keseluruh wilayah
- (7) Tujuan 7 : Mewujudkan jejaring kerjasama ekonomi dan kelembagaan dengan sasaran :
- Terwujudnya jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan.
- (8) Tujuan 8 : Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan berjiwa melayani dan mengayomi masyarakat, dengan sasaran:
- Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
 - Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas keuangan daerah yang berorientasi publik.
 - Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat

- (8) Tujuan 9 : Mewujudkan daerah yang mempunyai jati diri sejati yang tidak luntur dengan kemajuan ekonomi dan teknologi, serta pengaruh budaya baru, dengan sasaran :
- Terwujudnya daerah tujuan wisata berbasis warisan budaya leluhur dan sumber daya daerah yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakatnya.
- (9) Tujuan 10 : Mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan nyaman, dengan sasaran:
- Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia.
 - Terwujudnya masyarakat maju yang berakar pada nilai-nilai keagamaan.

7.4 Amanat RPJP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 - 2025

Mengacu pada kondisi daerah dan harapan pada 20 tahun kedepan, maka dapat dirumuskan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 - 2025 adalah **"Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius"**.

- **Kabupaten Musi Rawas yang maju** memiliki arti bahwa tingkat kemakmuran masyarakat daerah ini relatif lebih baik dari daerah-daerah lainnya yang tercermin pada tingginya tingkat pendapatan rata-rata penduduk, pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkembangnya lembaga dan pranata sosial kemasyarakatan yang ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dan ketertiban. Kemandirian daerah yang tinggi tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kemampuan aparaturnya yang baik, berkembangnya pemanfaatan sumberdaya lokal serta berkurangnya ketergantungan sumber daya dari daerah lain, sekaligus kemampuan membangun jaringan kerjasama untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.
- **Kabupaten Musi Rawas yang sejahtera** memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Musi Rawas, sehingga setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus dapat menciptakan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang sejahtera yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan daya beli serta pemerataan pendapatan, meningkatnya derajat kesehatan, meningkatnya derajat pendidikan serta tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan religius.
- **Kabupaten Musi Rawas yang religius** memiliki arti bahwa setiap kegiatan ekonomi dan sosial serta pemerintahan dan kemasyarakatan selalu dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, santun dan beretika tinggi, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam masa periode tahun 2005 - 2025, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah
2. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

3. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari.
4. Mewujudkan "Good Governance"
5. Mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang religius.
 1. **Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah** adalah pembangunan berkelanjutan di segala bidang dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi daerah dengan rincian sebagai berikut: pembangunan sumber daya manusia; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif pada sektor – sektor ekonominya; terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang andal dan terintegrasi; terwujudnya pasokan energi listrik dan air bersih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri, terwujudnya Musi Rawas sebagai *Cyber District* melalui pengembangan sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktivitas; dan terwujudnya Kabupaten Musi Rawas yang aman, nyaman dan damai.
 2. **Mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan di setiap kawasan dan pelosok wilayah; kabupaten tanpa memandang suku, etnik dan ras, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
 3. **Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
 4. **Mewujudkan "Good Governance"** yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparatur, serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik, demokratis, menjamin kebebasan berpendapat, memperkuat peran masyarakat sipil, dan mengarahkan setiap program pembangunan untuk kepentingan seluruh rakyat.
 5. **Mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang religius** adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kabupaten Musi Rawas melalui berbagai program pendidikan dan keagamaan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Musi Rawas sebagai "**Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius**" misi Pembangunan Jangka Panjang, maka arah pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

I. MEWUJUDKAN DAYA SAING KABUPATEN MUSI RAWAS

A. Kualitas SDM yang terus meningkat dengan ditandai oleh meningkatnya nilai IPM

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks yang menjelaskan tentang keberhasilan pembangunan suatu daerah yang berkenaan dengan kualitas SDM. Semakin tinggi angka IPM suatu daerah menunjukkan kualitas kehidupan sosial ekonomi daerah yang bersangkutan tinggi. Lebih lanjut, bahwa IPM terdiri dari beberapa komponen antara lain: indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli masyarakat yang diukur dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP). Untuk itu, dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Rawas yang berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan penduduk yang seimbang adalah:

Dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar: *pertama*, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar *output*-nya mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis merupakan prioritas pembangunan di daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan daerah, setiap warga daerah berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga daerah tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya selama 9 tahun. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat tersebut, arah pembangunan akan dilaksanakan sebagai berikut:

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen melalui:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana kualitas pembelajaran;
- b. Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja (*market friendly*);
- c. Meningkatkan layanan pendidikan keterampilan bagi Anak Luar Biasa agar dapat hidup mandiri;
- d. Mengintrodusir model sekolah unggulan di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dengan :

- a. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta persiapan untuk wajib belajar 12 tahun;
- b. Peningkatan sarana prasarana;
- c. Peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Peningkatan akses pendidikan formal, yang terjangkau.

Upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam mensikapi kesehatan, haruslah menjadi perhatian utama semua pihak khususnya pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit.

Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan, seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit. Dalam upaya terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat, arah pembangunan kesehatan antara lain berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan di Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah tertinggal; pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit;
- b. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, melalui pencegahan dan penanggulangan faktor resiko, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah berbagai penyakit termasuk flu burung; penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia zat besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
- c. Peningkatan ketersediaan obat dan pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan obat generik, pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);
- d. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin;
- e. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- f. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat;
- g. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan;
- h. Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan lingkungan sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat

asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan agenda penting dalam mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi daerah. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk. Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program KB. Sehingga dengan pengendalian ini, ke depan akan terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi daerah. Agar pengendalian pertumbuhan penduduk bisa terwujud serta peningkatan keluarga kecil yang berkualitas, maka arah pembangunan jangka panjang meliputi:

- a. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang;
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja;
- c. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

B. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sehingga PDRB per kapita mencapai di atas US\$ 7,000.

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi daerah untuk bisa memberikan pelayanan optimal dan upaya mensejahterakan bagi masyarakat. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar, yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Sejalan dengan penjelasan di atas, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Rawas yaitu berkenaan dengan tercapainya pendapatan per kapita masyarakat minimal US\$ 7,000 = Rp 66.500.000,00 (asumsi US\$ 1 = Rp 9.500,00) adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah) melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan;
- b. Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada;
- c. Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi, adanya

- perlindungan kesehatan dan keamanan kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal;
- d. Pengembangan potensi wilayah baik pada daerah aliran sungai, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah potensial lainnya dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
 - e. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan meningkatkan peluang bagi kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan basis mata pencahariannya.

C. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

Struktur perekonomian daerah lazim dibedakan menjadi 9 sektor ekonomi yang tertuang dalam PDRB masing-masing daerah, yakni mulai sektor pertanian sampai sektor jasa. Lebih lanjut, berkenaan dengan pembangunan ekonomi jangka panjang di Kabupaten Musi Rawas sehingga terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh, maka sektor pertanian diharapkan menjadi basis aktivitas kegiatan ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, pengembangan industri pengolahan dan manufaktur diarahkan sedemikian rupa hingga memiliki daya saing global. Untuk sektor jasa diharapkan dapat memberikan layanan publik yang bermutu dan berkualitas. Sejalan dengan pemikiran di atas, maka arah pembangunan jangka panjang bisa dirinci sebagaimana di uraian di bawah ini.

Pembangunan pertanian mencakup sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Musi Rawas selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan daerah untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang Pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian dan mempunyai *multiplier effect* yang besar, karena di sektor ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Musi Rawas menggantungkan hidupnya.

Selain itu mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar, sehingga dampak yang ditimbulkan dari sektor pertanian sangat luas. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan pertanian diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan merupakan titik pusat, sebagai sumber penggerak sektor lain, dengan pengembangan sistem agribisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap guncangan ekonomi. Pada masa krisis, pertanian merupakan sektor yang paling tahan terhadap badai krisis, dan merupakan sektor yang dapat menopang untuk tidak menjadikan krisis ekonomi berkelanjutan. Pembangunan di Bidang Pertanian ke depan menghadapi masalah antara lain semakin terbatas dan menurunnya daya dukung lahan dan kelangkaan sumber daya alam pertanian ditengah kondisi adanya kecenderungan peningkatan kuantitas dan kualitas kebutuhan pangan.

Kinerja investasi selama lima tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini menjadi salah satu faktor masih tingginya angka pengangguran. Sejalan dengan pemahaman di atas, dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi dan perdagangan, maka pembangunan jangka panjang diarahkan pada upaya:

- a. Menjamin kepastian usaha, menjaga hak kepemilikan terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik di bidang investasi;

- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya guna pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing;
- c. Penyederhanaan sistem dan prosedur;
- d. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan.

Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting karena di samping sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata.

Kabupaten Musi Rawas cukup banyak memiliki potensi obyek pariwisata baik wisata alam, wisata agro maupun wisata budaya yang apabila dikelola dengan manajemen yang baik akan turut mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Untuk mendukung pengembangan potensi wisata, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Sebab dengan baiknya tingkat aksesibilitas suatu kawasan akan menambah daya tarik wisata yang bersangkutan. Sementara itu, untuk “mengikatkan” antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan obyek wisata dirasa perlu untuk menumbuhkembangkan produk-produk wisata yang terkait dengan UMKM yang ada di daerah-daerah tujuan wisata.

Sehingga untuk meningkatkan peran pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas, maka arah pembangunan sektor Pariwisata dalam 20 tahun yang akan datang adalah:

- a. Meningkatkan dan menumbuhkan kembali potensi pariwisata yang bersumber pada potensi alam dan budaya yang berwawasan lingkungan serta pelestarian budaya, sebagai aplikasi dari Konsep *Ecotourism*;
- b. Meningkatkan kuantitas dan varietas potensi unggulan pariwisata dan diversifikasi produk pelayanan pariwisata yang memenuhi standar pelayanan, berdaya saing serta memenuhi rasa aman dan nyaman;
- c. Memberdayakan pengembangan pemasaran pariwisata terpadu agar tepat sasaran dan efisien serta menggalang peran serta masyarakat dengan cara memposisikan masyarakat sebagai subyek pengembangan pariwisata, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha pariwisata yang kooperatif dan dinamis;
- d. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan; Meningkatkan sosialisasi dan promosi keberadaan Pariwisata di Kabupaten Musi Rawas.

Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Musi Rawas didukung oleh tiga sektor besar, yakni sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian serta sektor industri. Sektor industri diarahkan untuk menjadi sektor yang kompetitif dalam rangka penciptaan struktur ekonomi yang seimbang melalui processing produk-produk agro dan turunannya serta terwujudnya kerjasama maupun kemitraan antar sub-sektor industri. Perkembangan sektor industri tersebut menggambarkan upaya keras Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menarik investor baru melalui penyederhanaan proses perijinan, peningkatan pelayanan perijinan, adanya perencanaan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Pertumbuhan investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap selama kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan kondisi perekonomian mulai membaik dan iklim dunia usaha secara

bertahap sudah mendukung pengembangan dunia usaha termasuk pengembangan industri informal. Dalam rangka perwujudan meningkatnya daya saing industri, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan sektor Industri adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan industri dalam rangka pengembangan rantai nilai untuk membentuk industri-industri yang kuat, meningkatkan nilai tambah dari setiap produk yang dibuat baik pada industri ataupun pada rantai nilainya, memperpanjang rantai nilai baik dengan meningkatkan inovasi maupun penguasaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai nilai untuk meningkatkan keseluruhan produktivitas;
- b. Mengembangkan IMKM agar perannya setara dengan industri besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan IMKM yang mandiri dan atau mendukung industri besar dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan;
- c. Mendorong investasi baru yang diarahkan pada industri yang berorientasi ekspor.

D. Terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang andal dan terintegrasi

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, fungsi pelayanan umum transportasi harus dilakukan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat luas, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional. Kabupaten Musi Rawas juga akan mendukung transportasi antar wilayah yang akan membuka peluang terjadinya perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, serta meningkatkan mobilitas tenaga kerja sehingga mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah melalui pembangunan jalur bebas hambatan.

Dengan adanya pemerataan keterampilan dan keahlian, maupun biaya antar wilayah, maka akan mendorong terciptanya kesamaan kesempatan pembangunan wilayah. Sejalan dengan gambaran di atas, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan transportasi adalah :

- a. Penanganan ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala;
- b. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas;
- c. Mendukung sistem jaringan jalan lintas yang mendukung kebutuhan industri;
- d. Membangun sistem jaringan jalan yang mendukung Kawasan Strategis Potensial;
- e. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan;
- f. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan;
- g. Membangun sistem transportasi baik darat, udara dan kereta api serta angkutan sungai.

E. Terwujudnya pasokan energi listrik dan air bersih

Untuk menunjang pengembangan industri dan pertumbuhan investasi serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga, maka diperlukan ketersediaan energi listrik yang cukup. Dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, diperlukan alternatif pilihan energi untuk mengurangi

ketergantungan terhadap energi listrik. Pembangunan di bidang sumberdaya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperilaku yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumberdaya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air. Potensi volume air yang cukup melimpah berupa sungai dan mata air, merupakan keunggulan dalam rangka peningkatan volume dan kualitas produk pertanian serta kualitas hidup masyarakat dalam bentuk penyediaan air bersih. Potensi tersebut juga merupakan peluang bagi terciptanya peningkatan pendapatan daerah sendiri melalui kerjasama investasi/ pengelolaan sumber air dengan daerah lain.

Sementara itu, berkenaan dengan terwujudnya pasokan air yang cukup dan layak, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan persoalan di atas adalah:

- a. Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan;
- b. Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan;
- c. Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis;
- d. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.

F. Terwujudnya Musi Rawas *Cyber District*

Arah kebijakan untuk terwujudnya Musi Rawas *Cyber District* antara lain:

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah;
- b. Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk pemeratakan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi, dan menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai aspek;
- c. Meningkatkan peran media massa dan *cyber-media* yang bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang obyektif, akurat, edukatif, dan terkini sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengembangkan media telekomunikasi dan informasi sehingga dalam aspek pelayanan publik sudah tidak perlu lagi temu muka antara pelayan dan yang terlayani;
- e. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi.

G. Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas yang aman, tertib dan damai

Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, Kabupaten Musi Rawas memerlukan kemampuan pertahanan daerah yang kuat untuk

menjamin tetap tegak dan eksisnya daerah Kabupaten Musi Rawas. Demikian pula dengan adanya gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan potensi konflik horizontal yang akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting terlaksananya pembangunan berbagai bidang dan merupakan salah satu daya saing yang harus terjaga.

- a. Keamanan dan ketertiban daerah diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan dan pembangunan keamanan dalam daerah serta pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografis, demografi, sosial dan budaya serta berwawasan nusantara;
- b. Sistem dan strategi pertahanan daerah secara terus menerus disempurnakan untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta berdasarkan kapabilitas pertahanan agar secara simultan mampu mengatasi ancaman dan memiliki efek penggentar. Dalam sistem pertahanan semesta tersebut, pertahanan daerah akan didesain untuk mempunyai kemampuan menangkal ancaman di wilayah teritorial Kabupaten Musi Rawas dan kemampuan untuk mempertahankan wilayah daratan, serta mengawasi dan melindungi wilayah ruangan udara daerah;
- c. Pemantapan komponen cadangan dan dukungan pertahanan daerah dalam kerangka basis strategis teknologi dan pembiayaan terus ditingkatkan dalam proses yang bersifat kontinyu maupun terobosan. Peningkatan kemampuan komponen dukungan pertahanan tersebut meliputi penguasaan kemampuan pemanfaatan kondisi SDA dan buatan, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana daerah terhadap kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan pertahanan, komponen bela daerah masyarakat, dukungan mutualisme industri strategis secara langsung maupun kemampuan konversi industri, serta keberlanjutan pembiayaan melalui rekayasa keuangan;
- d. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri beserta institusi terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

II. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN

Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen di Kabupaten Musi Rawas akan mendukung meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan juga akan mengurangi gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Musi Rawas yang maju pada berbagai bidang. Perekonomian daerah yang kuat merupakan keniscayaan dalam era desentralisasi ekonomi, karena daerah telah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola pembangunan secara relatif mandiri. Penguatan ekonomi daerah itu baru bermakna apabila seluruh masyarakat terlibat dalam kegiatan perekonomian. Di sinilah urgensinya dikembangkan perekonomian yang berbasis kerakyatan yang memiliki dua dimensi, *pertama*, orientasi pembangunan ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, faktor produksi dan aset produktif yang dimiliki, serta dikelola oleh masyarakat. Dengan jalan ini diharapkan pemerataan dan keadilan pembangunan dapat dicapai.

A. Tingkat pembangunan semakin merata diseluruh wilayah

- a. Mengoptimalkan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), dengan memberdayakan potensi dari setiap kecamatan yang tetap memfokuskan pada aktivitas di SWP tersebut.

- b. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
- c. Pertumbuhan Kabupaten Musi Rawas dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan Agropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan, melalui: (1) Penerapan manajemen perkotaan untuk pengembangan Agropolitan dan kawasan pusat-pusat pertumbuhan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga disekitarnya dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota kecil disekitar agropolitan agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kota satelit tetapi dapat menjadi kota mandiri; (2) Pengembangan ekonomi perkotaan di kawasan Agropolitan yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dan lain-lain; serta peningkatan kemampuan keuangan daerah agropolitan; dan (3) Pengembangan kawasan agropolitan melalui peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda.
- d. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan kawasan-kawasan tertinggal dan terpencil sehingga kawasan-kawasan tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara cepat dan dapat memperbaiki ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan kawasan-kawasan cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
- e. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal mata rantai industri, tahap produksi antara, tahap akhir produksi, sampai tahap konsumsi, serta perlu didukung, dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa antar kota/kawasan disekitar Kabupaten Musi Rawas.
- f. Tidak meratanya sarana dan prasarana, menyebabkan penyebaran penduduk di Kabupaten Musi Rawas tidak merata, di mana penduduk lebih terkonsentrasi pada pusat-pusat yang telah berkembang, perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pada wilayah-wilayah di mana kepadatan penduduk rendah, agar wilayah tersebut nantinya dapat menyerap tenaga kerja;
- g. Terdapat keluarga pra-sejahtera pada daerah pertanian, sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat petani agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
- h. Peningkatan pembangunan suatu wilayah dimungkinkan, jika ada akses pada wilayah tersebut. Artinya, perlu adanya pemberdayaan pada wilayah yang tertinggal di Kabupaten Musi Rawas.
- i. Pembangunan ekonomi wilayah akan lebih efisien dengan kerjasama antar daerah, terutama daerah yang saling berdekatan.
- j. Pemerintah daerah lebih menekankan dan mempercepat pemberdayaan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang.

- k. Mengoptimalkan wilayah-wilayah potensial untuk lebih berdaya, yang nantinya dapat membantu wilayah lain yang kurang berpotensi.
- l. Percepatan pembangunan kawasan-agropolitan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warganya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan topologi kawasan masing-masing.
- m. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di Agropolitan center dengan hinterland didorong secara sinergis yang memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktifitas ekonomi dan perdagangan (non-pertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di agropolitan center.
- n. Pembangunan pedesaan didorong melalui: pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian; peningkatan kapasitas SDM di pedesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dikawasan pedesaan dan kota-kota kecil dalam upaya menciptakan keterkaitan sektor sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *sosial capital* dan *human capital* yang belum tergalai potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.
- o. Memanfaatkan Rencana Tata Ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan.
- p. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan transparansi dan demokrasi. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform*, serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penerapan peraturan perundang-undangan pertanahan di daerah dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*; selain itu perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanahan.
- q. Pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat, kelembagaan; keuangan pemda termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan; penguatan lembaga legislative. Selain itu pemberdayaan masyarakat akan terus menerus ditingkatkan melalui: peningkatan pengetahuan dan ketrampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka; peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.
- r. Peningkatan kerja sama dengan daerah-daerah lain dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan, maupun

saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun pembangunan lainnya.

- s. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.
- t. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS, dengan didukung dengan peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
- u. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya pewujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

B. Terwujudnya Kemandirian pangan

- a. Mengoptimalkan dan mengembangkan lahan pertanian sebagai penghasil tanaman pangan dan melengkapinya dengan infrastruktur, misalnya saluran irigasi dan bendungan untuk meningkatkan hasil tanaman pangan.
- b. Mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang sebagian sudah menghasilkan dan berperan penting dalam meningkatkan PDRB, seperti misalnya sektor pertanian, sektor tanaman perkebunan dan perikanan merupakan sumber daya alam yang potensial untuk dioptimalkan.
- c. Mengembangkan pengolahan hasil sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempunyai kualitas gizi yang baik dan ramah lingkungan, seperti subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan perikanan yang meningkat dapat diberdayakan dengan melakukan pengolahan, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik.
- d. Kegiatan-kegiatan sosialisasi informasi pada makanan bergizi, kesehatan masyarakat, dan penyuluhan pertanian dilakukan dengan melibatkan instansi/dinas terkait, misalkan Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan pangan yang memadai.
- e. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga yang cukup baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman merata dan terjangkau.
- f. Koperasi yang berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisien kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen diberbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas usaha dan

keampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

C. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.

- a. Dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi, dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja pada pembangunan perumahan pada daerah-daerah yang kepadatan penduduk rendah, menuju wilayah mandiri.
- b. Bekerjasama dengan sektor swasta (misalnya: investor/para pengembang) agar dapat membiayai terlaksananya pembangunan perumahan yang memadai.
- c. Melakukan perbaikan pada sarana transportasi untuk menarik investor/pengembang datang ke Kabupaten Musi Rawas.
- d. Melakukan relokasi pada rumah-rumah yang berada di tepi sungai, perbukitan atau kawasan peyangga TNKS, dengan memberikan penyediaan sarana dan prasarana.
- e. Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya diarahkan pada: Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien; mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan swasta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; serta memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

III. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang Asri dan Lestari

Pembangunan yang mensejahterakan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari pembangunan yang dapat dilihat dari pendapatan per kapita, sedangkan kualitas hidup ditentukan oleh faktor yang lebih luas, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, kelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Sungguh pun begitu, tidak selamanya proses pembangunan yang mensejahterakan rakyat diikuti dengan kesinambungan proses pembangunan itu sendiri akibat terjadinya kerusakan lingkungan. Inilah yang banyak terjadi di daerah terbelakang. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara merusak lingkungan, seperti eksploitasi pertambangan, minyak, hutan, dan lain-lain. Model pembangunan seperti ini harus dicegah sehingga hasil pembangunan yang dinikmati hari ini tidak akan mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang berdaya saing, sejahtera dan mandiri, SDA dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

- a. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
- b. Pendayagunaan SDA yang terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggungjawab

dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, serta diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

- c. Dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, sangat perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya berorientasi ekonomi semata tetapi juga mengarah pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- d. Di dalam memelihara kekayaan dan keragaman SDA untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing masyarakat sangat memerlukan kebijakan pengelolaan SDA yang didukung oleh peningkatan kelembagaan SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
- e. Menjaga dan melestarikan sumber daya air sangat penting untuk menunjang kehidupan dan keberlanjutan pembangunan. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Dengan demikian pengelolaan sumber daya air ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- f. Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat akan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan dan menjaga kualitas kehidupan. Fokus kebijakan ini dapat diarahkan kepada generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyediakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, jaminan sosial, dan lain-lain sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam (sebagai cara untuk menambah pendapatan).
- h. Mendayagunakan SDA yang terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada

pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuh kembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

- i. Mengelola SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomasa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus sungai, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi dan menginternalisasikan biaya lingkungan, serta kemampuan ekonomi masyarakat dengan demikian pembangunan energi terus diarahkan kepada penganekaragaman energi, konservasi energi, dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi yang optimum bagi tiap jenis energi.
- j. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan khas. Diversifikasi produk dan inovasi pengelolaan hasil SDA terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global. Arah ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis SDA, di samping tetap menekankan pada pemeliharaan SDA yang ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan SDA yang ada di wilayahnya. Dengan demikian pembangunan ke depan tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.
- k. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di setiap wilayah. Kebijakan pengembangan SDA yang khas pada setiap wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah secara berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi ditingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas SDA. Pengelolaan SDA terutama di kawasan tertinggal diberikan perhatian khusus agar dapat dikembangkan potensinya untuk percepatan pembangunan kawasan, namun tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu diperlukan tata ruang yang mantap disertai penegakan hukumnya untuk menjadi pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
- l. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.

- m. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan, sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- n. Meningkatkan kapasitas pengolahan SDA dan lingkungan hidup. Kebijakan pengolahan SDA perlu di dukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup; penegakan peraturan lingkungan hidup yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan, etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

IV. Mewujudkan "Good Governance"

Kabupaten Musi Rawas yang demokratis merupakan landasan yang sangat penting di dalam perwujudan pembangunan yang lebih maju, berdaya saing, sejahtera, dan mandiri. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah transparansi kebijakan. Hukum sendiri pada dasarnya akan memastikan munculnya aspek-aspek keadilan dan kebersamaan. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi setiap anggota masyarakat secara menyeluruh. Hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

- a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur daerah melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara daerah terhadap prinsip-prinsip ke tata pemerintahan yang baik. Dengan memiliki tata pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelayanan publik akan semakin efisien dan pembiayaan pembangunan tidak lagi hanya dipikul oleh kemampuan keuangan pemerintah sendiri, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat.
- b. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan: (a) mewujudkan kebebasan pers yang bertanggungjawab dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan daerah secara cerdas dan demokratis; (b) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa lokal yang independen; (c) menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (d) menciptakan

jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas untuk memudahkan proses sosialisasi dan transparansi kebijakan.

- c. Memfasilitasi dan menjalin kemitraan yang baik dengan berbagai organisasi dan lembaga profesi hukum dan badan peradilan sehingga aparat hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan pelaksanaan pembangunan sektor hukum dapat berkembang dengan menunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh kondisi daerah yang baik agar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparat hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- d. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses terhadap pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga daerah serta terbentuk perilaku warga Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah dalam kerangka *good and clean governance* yang mendukung akselerasi pembangunan daerah, yaitu: meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif; meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; meningkatkan akuntabilitas kinerja aparat pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi; meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah; meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab; mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik; meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah; dan penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.

V. Mewujudkan Masyarakat yang Religius

Mewujudkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui berbagai program yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur

budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kedaerahan.

- a. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kerukunan antar umat beragama; Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak.
- c. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.
- e. Menciptakan program menuju Musi Rawas Darussalam.
- f. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat ditunjukkan untuk mewujudkan karakter bangsa yang merupakan kombinasi antar nilai-nilai luhur seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern untuk pembangunan.
- g. Budaya inovasi yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kabupaten Musi Rawas menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global yang dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersama dengan pengarahannya budaya konsumtif budaya produktif. Bentuk- bentuk pengungkapan kreatifitas antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia.

7.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Bertitik tolak dari arahan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010 - 2014, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Kabupaten Musi Rawas 2005-2025, dimana RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 - 2015 merupakan RPJMD periode kedua dari RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 - 2025, maka Kebijakan Umum Pembangunan Daerah diarahkan pada tiga pilar pembangunan yaitu : Musi Rawas Bumi Agropolitan, Musi Rawas Kawasan Pertambangan dan Musi Rawas Darussalam.

7.5.1 Musi Rawas Bumi Agropolitan

Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan, dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan). Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentuk campuran yang dinamakan *agropolis* atau kota di ladang.

Pada dasarnya kawasan Agropolitan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan; (2) mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang; (3) memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku; (4) memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif; (5) memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal. Sedangkan Agroindustri adalah kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut, sehingga menjadi produk jadi dan siap untuk dikonsumsi, atau produk antara dan siap untuk proses lebih lanjut.

Pengembangan Agroindustri diperlukan agar tercipta keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri, sehingga proses transformasi struktur perekonomian berjalan dengan baik dan efisien dari dominasi pertanian menjadi dominasi industri. Struktur perekonomian seimbang yang terwujud akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu : (1) kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan pendapatan daerah secara relatif menurun, sedangkan sektor-sektor diluar sektor pertanian mengalami kenaikan terutama untuk sektor industri; (2) penyerapan tenaga kerja secara relatif menurun sedangkan sektor-sektor diluar sektor pertanian mengalami kenaikan; (3) sektor pertanian mampu menyediakan bahan pangan untuk kebutuhan nasional; (4) sektor pertanian mampu menyediakan bahan baku untuk keperluan industri daerah, dan ; (5) produktifitas tenaga kerja disektor pertanian relatif sama besarnya dengan produktifitas tenaga kerja di luar sektor pertanian.

Arah Kebijakan pembangunan agropolitan diarahkan untuk :

1. Revitalisasi Pertanian
2. Pengembangan infrastruktur Agropolitan dan Kawasan cepat Tumbuh

3. Pengembangan komoditas unggulan dan pasar
4. Penguatan kelembagaan kemitraan pertanian
5. Pengembangan industri pertanian
6. Peningkatan ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan
7. Peningkatan kemandiriann dan daya beli petani

Dalam rangka mendukung peningkatan kesehataraan dan perlindungan sosial, pilar Musi Rawas sebagai bumi agropolitan diarahkan pada :

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan pelayanan pendidikan
3. Peningkatan pelayanan kesehatan
4. Pembangunan pedesaan dan pemberdayaan Komunitas Adat Tertinggal (KAT)
5. Penciptaan perlindungan, dan tanggungjawab sosial kemitraan
6. Pemberdayaan perempuan
7. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan kependudukan
8. Peningkatan peran pemuda dan olahraga.

7.5.2 Musi Rawas Kawasan Pertambangan

Musi Rawas sebagai gerbang investasi tidak bias lepas dari letak geografi dan kandungan bumi Musi Rawas. Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal dasar pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.

Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumberdaya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2011-2015).

Kebijakan umum Pembangunan Musi Rawas sebagai Kawasan Pertambangan diarahkan pada:

1. *Pengembangan pertambangan dan lingkungan dan b) Penguatan Investasi dan Daya saing. Pengembangan pertambangan dan lingkungan diarahkan pada :*
 1. Pengembangan kelistrikan
 2. Penataan kegiatan pertambangan
 3. Pengelolaan berwawasan lingkungan
 4. Pengembangan akses khusus pertambangan
 5. Percepatan kemandirian energy
2. *Penguatan Investasi dan Daya saing diarahkan pada:*
 1. Peningkatan pelayanan perizinan

2. Penciptaan kepastian hukum dan ketertiban umum
3. Pengembangan infrastruktur strategis
4. Pemberdayaan koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri
5. Pengembangan pariwisata dan Budaya
6. Pengembangan Jaringan pasar promosi, pembiayaan dan permodalan.
7. Peningkatan peran BUMD

7.5.3 Musi Rawas Darussalam.

Selama ini pemerintah pusat maupun daerah, lebih konsen membangun pembangunan fisik dibandingkan dengan non fisik seperti penguatan karakter bangsa. Akibatnya banyak terjadi degradasi moral, baik di lingkungan masyarakat maupun birokrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dikembangkan pilar Musi Rawas Darussalam. Dalam konsep Musi Rawas Darussalam dikembangkan keseimbangan antara fisik dan rohani sehingga terwujud karakteristik masyarakat yang madani.

Ada dua komponen dalam kultur Darussalam yaitu : a) Masyarakat sebagai Warga Negara, dan b) Birokrasi sebagai pemegang amanah rakyat. Dengan demikian, maka penguatan kultur Darussalam dilakukan dengan meningkatkan kualitas kehidupan beragama, baik bagi warga masyarakat maupun birokrasi.

Dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama, maka gerakan Good Governance yang telah dicanangkan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dimantapkan. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumberdaya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif

Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama.

Permasalahan pembangunan beragama sebagai berikut : (1) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat kurang memadai ; (2) kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial ; (3) berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan; (4) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum memuaskan ; (5) rendahnya kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana pendidikan agama ; (6) pelayanan kehidupan beragama belum memadai ; (7) sarana dan prasarana ibadah belum optimal pemanfaatannya dan belum efektif pengelolaan dana sosial keagamaan.

Arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama sebagai pilar Musi Rawas Darussalam diarahkan pada : a) Pengembangan kultur Darussalam, dan b) Penataan Kepemeintahan dan SDM. Kedua agenda ini sangat berkaitan, sebab pengembangan kultur darussalam sangat terkait dari percontohan birokrasi dan masyarakat, sebaliknya kultur darussalam akan menopang tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengembangan kultur Darussalam diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama
2. Peningkatan kerukunan antar umat beragama
3. Penguatan kultur darussalam

Penataan pemerintahan dan SDM diarahkan pada :

1. Peningkatan pelayanan publik
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja
3. Penguatan lembaga kemitraan
4. Percepatan Pembangunan pusat pemerintahan
5. Percepatan pengembangan wilayah

FORMAT HALAMAN

7.1	Pengertian Arah Kebijakan Umum	1
7.2	Amanat RPJM Nasional Tahun 2010-2014	1
7.3	Amanat RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013.....	2
7.4	Amanat RPJP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 - 2025	6
7.5	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	25
7.5.1	Musi Rawas Bumi Agropolitan	25
7.5.2	Musi Rawas Kawasan Pertambangan	26
7.5.3	Musi Rawas Darussalam.....	27